

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran (LPP Kalurahan ATA) 2023** Lurah Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Singosaren.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Lurah Singosaren kepada Bupati Bantul melalui Panewu Banguntapan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan selama mulai Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di kalurahan Singosaren, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran (LPP Kalurahan ATA) 2023 Lurah Singosaren ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Akhirnya, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya. Amin

Singosaren, 7 Maret 2023


H. JOJO PRAYITNO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I : Pendahuluan	
A. Tujuan Penyusunan Laporan	3
B. Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.....	4
C. Strategi Dan Kebijakan	5
Bab II : Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.....	8
Bab III : Program Kerja Pembangunan Kalurahan.....	16
Bab IV : Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	23
Bab V : Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	25
Bab VI : Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	26
Bab VII : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.....	27
Bab VIII : Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh	
A. Keberhasilan Yang Dicapai	29
B. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh	31
Bab IX : Penutup	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Hakikat dari pembuatan laporan adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu instansi atau lembaga dalam hal ini adalah Pemerintah Desa terutama kinerja dalam hal pengelolaan keuangan. Pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan menjadi kewajiban Pemerintah Kalurahan sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Penyusunan laporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Kalurahan yaitu asas akuntabel. Dengan kata lain pelaporan ini berfungsi sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Kalurahan.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah kalurahan dalam kurun satu tahun;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kalurahan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Kalurahan beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan ke masyarakatan, pada tahun berikutnya; serta
6. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kalurahan dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Kalurahan, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Singosaren ditetapkan dengan Visi Lurah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kalurahan Singosaren Yang Agamis, Kuat, Maju, Damai, Sejahtera, Dan Gotong Royong Dengan Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Dan Sosial Budaya Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kalurahan yang religius, sehat, dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Allah SWT.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan aset kalurahan (tanah kas desa, pasar kalurahan, parkir wisata, dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
3. Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, Kejar Paket B & C, maupun kursus-kursus.
4. Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi, dan tempat bermain.
5. Meningkatkan bidang kepemudaan dan olah raga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.
6. Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju kalurahan wisata dan membuka Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga kalurahan.
8. Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan

berkesinambungan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan kalurahan memuat strategi pembangunan kalurahan dalam mengimplementasikan program Lurah sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan. Strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi.

Adapun strategi pembangunan Kalurahan Singosaren adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Mewujudkan masyarakat kalurahan yang religius, sehat, dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Alloh SWT.

Strategi:

- a. Peningkatan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan keagamaan.
- b. Peningkatan sarana prasarana peribadatan.
- c. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar agama.

2. Misi Kedua

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan aset kalurahan (tanah kas kalurahan, pasar kalurahan, parkir wisata, dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKalurahan).

Strategi:

- a. Inventarisasi aset dan potensi kalurahan.
- b. Pengelolaan aset kalurahan yang profesional.
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan) melalui pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan.

3. Misi Ketiga

Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, Kejar Paket B & C, maupun kursus-kursus.

Strategi:

- a. Peningkatan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di kalurahan.
- b. Peningkatan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
- c. Pengelolaan Kejar Paket B dan Paket C.
- d. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan.

4. Misi Keempat

Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi, dan tempat bermain.

Strategi:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- b. Peningkatan usaha promosi pencegahan penyakit.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyakit.
- d. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.

5. Misi Kelima

Meningkatkan bidang kepemudaan dan olah raga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Strategi:

- a. Fasilitasi kegiatan kepemudaan.
- b. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan yang lain.
- c. Pengembangan potensi sumber daya lokal untuk penciptaan peluang usaha.

6. Misi Keenam

Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju kalurahan wisata dan membuka Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.

Strategi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi nilai tradisi dan budaya local.
- b. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.

7. Misi Ketujuh

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga kalurahan.

Strategi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan kalurahan melalui pendidikan berkelanjutan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- c. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
- d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kalurahan dengan melakukan reformasi anggaran.
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan.
- f. Peningkatan sistem distribusi informasi dan komunikasi.
- g. Peningkatan ketersediaan informasi publik.

8. Misi Kedelapan

Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan.

Strategi:

- a. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
- b. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan.
- c. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Pada tahun 2023, Pemerintah Kalurahan Singosaren telah mekaskanakan beberapa kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan. Program-program atau kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah dan Pamong Kalurahan dapat diberikan penghasilan tetap (siltap) yang anggarannya bersumber ADD (Alokasi Dana Desa).

2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802), Lurah beserta Pamong Kalurahan dapat diberikan tunjangan jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan.

Tunjangan jaminan kesehatan dibiayai dari APBD Kabupaten bantul sebesar 4% gaji tiap bulannya atau senilai Rp 1.185.600,- tiap bulannya dan 1% gaji yang dipotongkan dari gaji pamong kalurahan. Adapun untuk staf honorer, iuran 4% gaji dipotongkan dari APBKal yang bersumber dari ADD.

3. Operasional Perkantoran

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang baik bidang kesekretariatan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan maka diadakan kegiatan Operasional Perkantoran. Kegiatan Operasional Perkantoran meliputi :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
- b. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan
- c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe

- d. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
 - f. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 - g. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Des
 - h. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
 - i. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
 - j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
 - k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
 - l. Belanja Jasa Langganan Listrik
 - m. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
 - n. Belanja Jasa Langganan Telepon
 - o. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
 - p. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 - q. Belanja Pemeliharaan Peralatan
 - r. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
4. Penyediaan Tunjangan Bamuskal.
5. Operasional Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan)
 Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) diadakan kegiatan operasional Bamuskal. Operasional BPD terdiri dari:
- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor
 - b. Fotocopy / penggandaan
 - c. Pengadaan makan minum rapat
6. Kegiatan Jaring Aspirasi Bamuskal.
 Kegiatan aring aspirasi Bamuskal dilaksanakan dalam rangka persiapan bahan musyawarah kalurahan (muskal). Sebelum disampaikan dan dibahas saat muskal, Bamuskal melakukan penjaringan aspirasi dari masyarakat terkait rencana pembangunan kalurahan.
7. Operasional RT (Rukun Tetangga)
 Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi RT (Rukun Tetangga) diadakan kegiatan operasional RT.
8. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal.
9. Pemberian Tambahan Penghasilan dari Tanah Pelungguh/Bengkok.
10. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
 Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran dengan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap/tunjangan kedudukan, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, dan ditambah tunjangan anak. Jika dijumlah maka nilai tunjangan hari raya di tahun 2023 sebesar Rp 49.300.848,00 yang bersumber dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah.

11. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran.

Pada tahun 2023, untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kalurahan menambah beberapa sarana perkantoran seperti CCTV sebanyak 5 unit, Kipas angin sebanyak 5 unit, audio mixing portable sebanyak 1 unit, scanner merk Canon sebanyak 1 unit, UPS merk APC sebanyak 1 unit, dan Personal Computer sebanyak 1 unit.

12. Pemeliharaan Kantor Kalurahan.

13. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan.

Kegiatan ini meliputi beberapa sub kegiatan seperti pemutakhiran data warga per RT, pengelolaan profil kalurahan yang diaplikasikan dalam pengisian profil kalurahan di situs <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> sebagai agenda wajib tahunan.

Kemudian sejak tahun 2021 berdasar amanat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait input data SDGs. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

14. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan

Arsip tercipta seiring berjalannya aktivitas instansi bersangkutan. Semakin besar instansi maka arsip yang tercipta pun semakin banyak. Permasalahan yang terkait dengan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan tentunya semakin kompleks, sehingga membutuhkan pengelolaan arsip yang tepat.

Dan dasar hukum pengelolaan arsip yaitu:

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan kearsipan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan dan pemerintah daerah

Sedangkan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Kalurahan.

15. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif.

Analisis Kemiskinan Partisipatif yang disingkat AKP dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Artinya bahwa AKP bisa dikembangkan sebagai media diagnosis kemiskinan, yakni sebuah instrumen untuk mengakomodasi pandangan orang miskin terhadap kemiskinan dan memformulasikan strategi penanggulangan kemiskinan dalam kebijakan publik.

AKP tidak sekedar alat analisis, tetapi mempunyai peran penting dalam menyediakan ruang bagi masyarakat miskin untuk menganalisis masalahnya, menyuarakan kepentingannya, dan memutuskan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, tetapi hasil analisa kemiskinan partisipatif bisa diperkuat dengan informasi dan data kuantitatif yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber data yang digunakan sebagai dasar melakukan diagnosis kemiskinan.

Salah satu hal penting dalam penerapan AKP adalah untuk mengembangkan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan memahami kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilandasi adanya pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi penduduk miskin akan dapat membantu proses perencanaan dan pelaksanaannya sehingga akan memberikan hasil lebih baik. Pada intinya bahwa AKP merupakan serangkaian kegiatan analisis kemiskinan yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi akses, partisipasi, kontrol masyarakat mendapatkan proporsi yang memadai.

16. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan

Tahap pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset kalurahan yang terdiri dari kegiatan:

- a. Menghitung jumlah barang/luas/volume.
- b. Meneliti kondisi fisik barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat).
- c. Mengidentifikasi merek, jenis barang, ukuran, dan tanggal perolehan barang.
- d. Menempelkan label registrasi (kodefikasi) sementara pada aset kalurahan yang telah dihitung dan didata.
- e. Mencatat hasil Inventarisasi tersebut pada Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dan selanjutnya mencatat aset kalurahan tersebut dalam Buku Inventaris Aset Kalurahan.

17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
Kegiatan Musrenbang kalurahan telah berhasil dilaksanakan pada Oktober 2023 yang sebenarnya telah melampaui batas waktu ideal penyelenggaraan Musrenbang.

18. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan.

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Kalurahan 2023 telah berhasil dilaksanakan pada 1 November 2023.

19. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus

Musyawarah Kalurahan Khusus di tahun 2023 membahas tentang kelompok penerima manfaat (KPM) BLT DD 2024.

20. Musyawarah Dusun Khusus.

Musyawarah Dusun Khusus di tahun 2023 membahas program baru dari Bupati dan Wakil Bupati yakni Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Padukuhan dengan pagu anggaran 50 juta per padukuhan.

21. Penyusunan dan Penetapan RKP Kalurahan

Kegiatan dalam penyusunan RKP Kalurahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawali penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan
- b. Salah satu hasil dari musyawarah Kalurahan adalah terbentuknya tim penyusun RKP Kalurahan
- c. Setelah tim terbentuk, yang pertama kali dilakukan tim adalah mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kalurahan. Untuk penyusunan RKP Kalurahan 2023 ini, tim mengambil pagu indikatif tahun sebelumnya (tahun 2023) sebagai acuan karena belum adanya informasi resmi

baik dari Pemerintah Pusat maupun Kabupaten terkait pagu anggaran 2024.

- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
- e. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan;
- f. Pembahasan RKP Kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan; dan
- g. Penetapan RKP Kalurahan.

22. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan

Pada tahun 2023 Pemerintah Kalurahan telah berhasil menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan yang ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan sejumlah 9 Peraturan Kalurahan yakni:

- a. Peraturan Kalurahan Nomor 1 tahun 2023 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2022.
- b. Peraturan Kalurahan Nomor 2 tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Peraturan Kalurahan Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Musyawarah Kalurahan.
- d. Peraturan Kalurahan Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2023.
- e. Peraturan Kalurahan Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2024.
- f. Peraturan Kalurahan Nomor 6 tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Kalurahan.
- g. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2024.

23. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Singosaren yang bertanggungjawab dan transparan, pada tahun 2022 Lurah Singosaren menyampaikan laporan antara lain terdiri dari:

- a. LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan) akhir tahun anggaran 2023 kepada Bupati Bantul melalui Panewu Banguntapan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan berhasil diselesaikan tepat pada batas akhir waktunya sebagaimana peraturan yang berlaku yakni pada bulan Maret 2023.

- b. LKPPKal (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan) akhir tahun anggaran 2022 kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Laporan berisi langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

24. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

25. Penjaringan Pamong Kalurahan untuk Formasi Kamituwo.

Sabtu, 20 Mei 2023 di Ruang Sidang LPPM UNY diselenggarakan Seleksi Perangkat Kalurahan Singosaren dengan jumlah peserta seleksi sebanyak 6 orang calon Kamituwo, terdiri dari 4 orang peserta perempuan dan 4 orang peserta laki-laki yang merupakan akitivitis atau kader militan kalurahan dari latar belakang pendidikan yang berbeda dari jenjang SMA sampai dengan S1.

26. Pengisian Bamuskal Masa Bakti 2024-2030

Pada tanggal 22 September 2023, kami mengumumkan calon anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat administrasi dan menjadi peserta dalam proses selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan pada tanggal 7 Oktober 2023, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keterwakilan gender yang seimbang dalam kepengurusan.

Tanggal 9 hingga 15 Oktober 2023 menjadi waktu pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah, di mana para anggota kalurahan memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka dalam BAMUSKAL. Proses selanjutnya adalah penetapan calon anggota BAMUSKAL terpilih oleh panitia pada tanggal 16 Oktober 2023.

Proses pengisian BAMUSKAL dilakukan dengan transparan dan partisipatif, dengan memastikan representasi yang adil dari seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap kepengurusan BAMUSKAL yang baru terpilih dapat melanjutkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dengan penuh dedikasi dan integritas.

27. Pengadaan Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital.

Pengelolaan sistem pemerintahan kalurahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan manfaat diantaranya mendukung pengambilan keputusan, sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan kalurahan, serta menjadi sarana pertanggungjawaban perangkat kalurahan atas penyelenggaraan

pemerintahan.

Dalam perkembangannya, data Sistem Informasi Desa (SID) selanjutnya akan lebih mudah dipahami apabila dikembangkan dalam bentuk spasial data yang berbasis web GIS. Pengembangan data SID dengan basis web GIS memiliki beberapa keuntungan. Diantaranya adalah mempermudah dalam pendataan penduduk, pembayaran pajak bumi bangunan, pendataan bantuan, dll.

28. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pembayaran pajak atas tanah Kalurahan di tahun 2023 senilai Rp 20.740.301,00

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pada tahun 2023, Pemerintah Kalurahan Singosaren telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam Bidang Pembangunan Kalurahan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PAUD dan TK Milik Kalurahan

Dalam rangka menyiapkan generasi anak bangsa yang terdidik sejak dini, Pemerintah Kalurahan memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan dini seperti PAUD dan TK. Dukungan kegiatan berupa pemberian makanan tambahan bagi peserta didik, operasional rapat pengurus PAUD dan TK, serta support kepada para pendidik dan tenaga kependidikan berupa insentif bulanan. Di Kalurahan Singosaren ada 4 PAUD: PAUD Jelita Singosaren I, PAUD Mutiara Harapan Sarirejo II, PAUD Ceria Semoyan, dan PAUD Annisa Singosaren III, serta 1 TK yakni TK LKMD.

2. Penyelenggaraan Gebyar PAUD

Sabtu, 26 Agustus 2023 diselenggarakan Gebyar PAUD Kalurahan Singosaren yang diikuti oleh peserta didik dan pendidik PAUD KB Jelita Sarirejo 1, KB Mutiara Harapan Sarirejo II, KB Ceria Semoyan, KB Annisa Singosaren III, TK LKMD Singosaren dan TK ABA Annisa Singosaren.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu PAUD Kapanewon Banguntapan Ibu Mega, Lurah Singosaren Bapak H Joko Prayitno, Ketua Pokja Ibu PAUD Kapanewon Banguntapan Ibu Yayuk, Ketua Pokja II TP PKK Kapanewon Banguntapan, Ibu PAUD Kalurahan Singosaren Ibu Siti Asfiah, S.Ag., M.M., , Ketua Pokja Ibu PAUD Kalurahan Singosaren Ibu Rarasati Mawftiq, S.Pd. M.Si., Pengurus harian dan Pokja II TP PKK Kelurahan Singosaren. Kegiatan ini menampilkan kreasi anak anak, lomba mewarnai dan dongeng oleh pendongeng cilik Mas Sabda dari SD Jomblangan.

3. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Ketersediaan APE bermanfaat bagi anak-anak dimana:

- a. Berinteraksi dengan alat permainan edukatif memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapat pengalaman langsung dengan cara mendengar, melihat, meraba, menghidu dan merasa.

- b. Stimulasi yang diterima oleh panca indera melalui alat permainan edukatif akan mendorong rasa ingin tahu peserta didik terhadap berbagai benda dan peristiwa yang terjadi di lingkungannya, yang akan mengembangkan aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa dan sosio-emosional, serta moral dan agama.

4. Penyelenggaraan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar program dan kegiatan untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan situasi/kebutuhan lokal yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat.

Melihat betapa pentingnya kegiatan posyandu bagi masyarakat usia balita dan lansia, Pemerintah Kalurahan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu. Dukungan berupa pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia, operasinal rapat pengurus posyandu, serta insentif kader posyandu.

5. Perbaikan Gedung TK LKMD selesai pengerjaan sekitar bulan Agustus 2023.
6. Peningkatan Gedung PAUD Annisa selesai pengerjaan sekitar bulan Agustus 2023.
7. Fasilitasi Kegiatan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga adalah dengan maksimalisasi peran dan kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan Sub PPKBD).

Mengapa? Karena kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat

seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun.

Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia” pada poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan daya beli sehingga pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat mengurangi kuantitas/ jumlah penduduk di satu sisi dan meningkatkan kualitas di sisi lainnya.

Hal ini sejalan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Bab X pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sehingga menjadi arah Kebijakan dan Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Karenanya, masyarakat hari ini bukan lagi sebagai obyek dari sebuah kebijakan melainkan sebagai pelaku utama kebijakan pembangunan yang diprogramkan pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang peran serta masyarakat dan pemerintah yang harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju terciptanya pembangunan nasional.

Selanjutnya dengan upaya “membangun Indonesia dimulai dari keluarga” adalah sebuah cita-cita pembangunan nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam semua bidang kehidupan, maka upaya keberadaan Kader IMP sebagai bagian dari penggerak kegiatan pembangunan di lapangan diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena bagaimanapun, pembangunan dalam bidang Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga, tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir namun belum nampak kompetensi yang dimiliki serta belum terlibat dan berperan serta secara aktif sebagaimana semestinya. Sehingga peningkatan peran dan kompetensi Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) menjadi penting dan mendesak untuk menjawab semua kekurangan dan kelemahan yang ada

dilapangan selama ini.

Dengan demikian agar para kader IMP mampu dalam menjalankan dan melaksanakan program serta kegiatan harus ditunjang dengan upaya peningkatan peran dan kompetensi dari kader IMP itu sendiri.

8. Penyelenggaraan PSN Jumatik

Gerakan Serentak (Gertak) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Menguras, Menutup, Memantau dan Menimbun (3M Plus) menjadi upaya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul untuk mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD). Kegiatan ini sudah berlangsung rutin selama beberapa tahun.

Kenapa kita harus menggalakkan kegiatan PSN?

Pencegahan paling baik adalah dengan PSN karena dengan PSN kita bisa mencegah jentik nyamuk berkembang menjadi nyamuk dengan memutus mata rantai. Masyarakat didorong untuk menjadi juru pemantau jentik (jumantik) di setiap rumahnya untuk memastikan rumahnya tak ada jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

9. Konvergensi Pencegahan *Stunting*

World Health Organization (WHO) menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Di Indonesia, sebanyak 7,8 juta atau sekitar 35,6 persen dari 23 juta balita pada 2017 menderita stunting. Angka tersebut memicu reaksi WHO untuk menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Secara umum, penyebab stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, penyebab lainnya adalah buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan. Dalam upaya pencegahan tersebut, Pemerintah Kalurahan Singosaren ikut berperan serta membantu pemerintah dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil & menyusui serta mengecek kualitas air.

10. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik,

kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Pemerintah Kalurahan memberikan dukungan kegiatan berupa anggaran konsumsi kegiatan, rak buku, perlengkapan alat makan & minum, box plastic, dan ral almari.

11. Penyelenggaraan Posbindu.

Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-PTM) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM terintegrasi (Penyakit jantung ,diabetes, penyakit paru,asma,dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.

Posbindu dari usia berapa?

Melalui Posbindu PTM, dapat segeranya dilakukan pencegahan faktor risiko PTM sehingga kejadian PTM di masyarakat dapat ditekan. Sasaran utama adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Pelaksanaan Posbindu PTM dilakukan oleh kader kesehatan yang telah ada atau beberapa orang dari masing-masing Padukuhan yang bersedia menyelenggarakan posbindu PTM, yang dilatih secara khusus, dibina atau difasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM di masing-masing kelompok atau organisasinya. Kriteria Kader Posbindu PTM minimal bisa membaca dan menulis, lebih diutamakan berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Dukungan Pemerintah Kalurahan berupa pemberian paket strip cek kolesterol, asam urat dan gula. Nilai bantuan total sebesar Rp 18.000.000,-

12. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat

Rumah Kalurahan Sehat (RKS) adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kalurahan di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan, dan pusat penyebaran informasi kesehatan meliputi layanan.

Yang dimaksud dengan pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kalurahan adalah:

- ✓ Kader Posyandu;
- ✓ guru PAUD;
- ✓ kader kesehatan;
- ✓ unit layanan kesehatan;

- ✓ unit layanan pendidikan;
- ✓ Kelembagaan Kalurahan (kader PKK, Karang Taruna, LPM,dll);
- ✓ tokoh masyarakat; dan
- ✓ berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting.

13. Pembinaan Kampung KB

Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistimatis.

14. Pembangunan Rumah Pilah Sampah

Pembangunan rumah pilah sampah di wilayah Padukuhan Singosaren III dengan nilai anggaran Rp 50.000.000,- yang bersumber dari program PPBMP.

15. Pelatihan Pengelolaan Sampah

Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah Sampah Organik dan Anorganik Sebagai Media Pendukung Menuju Bantul Zero Waste di Pedukuhan Singosaren I. Adanya tema tersebut mendukung program Pemerintah Kab. Bantul terkait dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bantu Bebas Sampah tahun 2025. Masyarakat diajak untuk memaksimalkan dan meminimalisir sampah rumah tangga. Seperti botol plastic, sampah sisa makanan dapat di manfaatkan sebagai bahan menanam kangkung air. Selain itu peserta juga diajari cara pengolahan sampah organic sisa rumah tangga menjadi pupuk cair.

16. Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur / Fisik

- a. Perbaikan Jalan Karang Asem sepanjang 120 meter selesai pengerjaan sekitar bulan Maret 2023.
- b. Pembangunan akses jalan menuju PAUD Ceria Semoyan sepanjang 25 meter selesai pengerjaan sekitar bulan Maret 2023.
- c. Pelebaran Jalan Joyopranan sepanjang 13 meter selesai pengerjaan sekitar Juni 2023.
- d. Perbaikan jalan konblok RT 03 Singosaren I sepanjang 110 meter selesai pengerjaan sekitar November 2023.
- e. Pembangunan jalan konblok RT 04 Singosaren I sepanjang 23 meter selesai pengerjaan sekitar November 2023.
- f. Perbaikan jalan Sarirejo II Rt 06 sepanjang 42 meter selesai pengerjaan sekitar Oktober 2023.

- g. Perbaiki jalan Singosaren III RT 05 sepanjang 60 meter selesai pengerjaan sekitar Oktober 2023.
- h. Perbaiki Jl. Janoko Singosaren III sepanjang 37 meter selesai pengerjaan sekitar Oktober 2023.
- i. Program Padat Karya Jogja Istimewa
- j. Pembangunan Irigasi Kemas sepanjang 110 meter selesai pengerjaan sekitar September 2023.
- k. Perbaiki Saluran Irigasi Sarirejo I sepanjang 230 meter selesai pengerjaan sekitar September 2023.

17. Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan

Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup di era digital. Jaringan internet yang lancar dan kuat sangat memberikan manfaat yang besar, terutama di era modern sekarang ini.

Salah satu program Pemerintah Kalurahan Singosaren untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam bekerja dan belajar dari rumah adalah dengan membangun fasilitas WiFi Publik. Sampai saat ini sudah selesai dibangun 5 (lima) titik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Diharapkan fasilitas internet gratis ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencari informasi, meningkatkan perekonomian dengan jual beli online, dan mendukung siswa untuk belajar secara daring.

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pada tahun 2023, Pemerintah Kalurahan Singosaren telah mekaskanakan beberapa kegiatan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan. Program-program atau kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan Pos Keamanan Kalurahan

Pos keamanan merupakan bagian penting, sebagai sarana keamanan terutama untuk para petugas siskamling dan linmas saat istirahat dan berkumpul, baik sebelum maupun setelah keliling melaksanakan tugas dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.

2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota Linmas, Pemerintah Kalurahan Singosaren mengadakan pelatihan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalisasi keberadaan linmas di tengah-tengah masyarakat.. Salah satu tugas pokok dan fungsi linmas saat penanggulangan bencana harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satuan Linmas harus mampu menjadi pelopor dan penggerak pengamanan swakarsa ditengah-tengah masyarakat. Linmas juga didorong untuk membaur dengan kelompok-kelompok masyarakat guna menciptakan situasi tertib, tentram dan aman di wilayah Kalurahan.

3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Linmas, diselenggarakan penunjang operasional Linmas yakni: makan minum rapat, honor pengamanan kegiatan, dan perlengkapan linmas.

4. Penguatan Kalurahan Aman Covid-19

Kalurahan Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Kalurahan yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Agenda aksi Kalurahan Aman COVID-19 diantaranya:

- a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru
- b. merawat sebagian ruang isolasi Kalurahan agar sewaktu-waktu siap

digunakan ketika dibutuhkan.

c. mempertahankan pos jaga Kalurahan

5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan RI
6. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh
7. Fasilitasi Operasional Kaum Rais
8. Penyelenggaraan Festival dan Lomba Kepemudaan Tingkat Kalurahan
Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu mini soccer, bola voli, badminton dan e-sport.

Tujuan digelarnya Pordes ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap olahraga guna menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Selain itu juga untuk menjalin silaturahmi dan keakraban antar warga.

9. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKD) seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, maupun pokgiat merupakan mitra bagi Pemerintah Kalurahan dalam mensukseskan pembangunan di kalurahan. Keberadaannya tidak bisa dinafikan dalam proses kemajuan kalurahan. Untuk menunjang eksistensi dari LKD maka diberikan dana operasional seperti ATK, makan minum rapat, maupun seragam.

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada tahun 2023, Pemerintah Kalurahan Singosaren telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan. Program-program atau kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Kalurahan.

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 dalam rangka pencapaian SDGs Desa sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 7 Tahun 2021 ada 3 poin besar yang menjadi fokus utama *pertama* pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, *kedua* mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan kalurahan, *ketiga* program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan salah satu kegiatannya yaitu penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan kalurahan tanpa kelaparan.

2. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

Pembangunan saluran irigasi dengan volume 250 meter yang melintasi Kemas RT 01 tersebut dilaksanakan pada 23 Mei s/d 18 Juni 2023. Pembangunan melibatkan pekerja 8 orang, tukang 3 orang, dan kepala tukang 1 orang selama 24 hari.

3. Fasilitasi Kelompok Wanita Tani.

BAB VI

PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN

Penganggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/ atau menangani permasalahan yang muncul di Kalurahan yang tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi “anggaran siap pakai” ketika Kalurahan menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan mendesak.

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 diatur dalam ***Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023***, yang diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Dalam Bab 2 pasal 5, Permendes 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, disebutkan ada 3 (tiga) fokus Prioritas Dana Desa yang perlu dimasukkan ke dalam RKPDes Tahun 2023, diantaranya yaitu:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Kalurahan
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kalurahan

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
3. Mewujudkan kalurahan tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Dalam pengelolaan keuangan kalurahan, Pemerintah Kalurahan Singosaren telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Sebagai bentuk pengelolaan keuangan dengan sistem terbuka, akuntabel dan terarah, Pemerintah Kalurahan Singosaren telah melakukan perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Bentuk perencanaan dan pelaporan tersebut tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat yakni berupa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

A. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, maka Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

Setelah APBKal disahkan bersama Bamuskal, Pemerintah Kalurahan mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dalam perjalannya ada dinamika yang mengharuskan adanya peninjauan kembali terhadap APBKal, maka Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 2.830.334.105,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 1.604.661.514,12 |
| b. Bidang Pembangunan Desa | Rp 889.702.944,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 352.421.800,00 |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	191.723.100,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	Rp	118.903.781,76
Jumlah Belanja	Rp	<u>3.157.413.139,88</u>
Defisit	Rp	327.079.034,88
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	327.079.034,88
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	327.079.034,88

B. Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kalurahan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.871.767.505,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.368.999.231,04
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp	833.414.444,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	321.487.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	166.429.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp	93.600.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.783.929.675,04</u>
Surplus	Rp	87.837.829,96
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	327.079.034,88
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan	Rp	327.079.034,88
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)	Rp	414.916.864,84

BAB VIII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Keberhasilan yang Dicapai

Selama satu tahun 2023 Pemerintah Kalurahan Singosaren dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dibidang cukup berhasil, dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah kalurahan meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Singosaren telah berhasil menyelenggarakan:

- a. Pemenuhan Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan.
- b. Pemenuhan jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan.
- c. Penyediaan operasional Pemeritah Kalurahan.
- d. Penyediaan tunjangan Bamuskal.
- e. Penyediaan operasional Bamuskal.
- f. Penyediaan tunjangan purna tugas bagi pamong kalurahan.
- g. Penyelenggaraan Penjaringan Seleksi Pamong Kalurahan untuk Jabatan Ulu-Ulu.
- h. Penyediaan Operasional RT.
- i. Penyelenggaraan Musdes, Musrenbangdes / Pembahasan APB Kalurahan, baik regular maupun non regular.
- j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RKP Kalurahan).
- k. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan.
- l. Penyusunan Laporan Lurah.
- m. Pemutakhiran Profil Kalurahan.
- n. Pemutakhiran data SDGs Kalurahan.
- o. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi Aset Kalurahan.
- p. Pembayaran PBB atas Tanah Kas Kalurahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren tahun 2023 telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, meliputi:

- a. Penyelenggaran PAUD dan TK Milik Kalurahan.
- b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
- c. Pengadaan Sarana Prasaran APE PAUD.
- d. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh.
- e. Penyelenggaraan Posyandu.
- f. Pembangunan gedung Posyandu.
- g. Penyelenggaraan Posbindu.
- h. Konvergensi pencegahan *stunting*.
- i. Pembinaan Kampung KB.
- j. Giat Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Lingkungan Kalurahan pada hari Jumat.
- k. Pembangunan rumah pilah sampah.
- l. Pelatihan pengelolaan sampah.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan Singosaren tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan:

- a. Pengadaan pos keamanan.
- b. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
- c. Pembinaan kaum rais.
- d. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kalurahan
- e. Penyelenggaraan Upacara Bendera HUT RI
- f. Pembinaan LPM Kalurahan
- g. Pembinaan PKK

4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pembangunan saluran irigasi guna menunjang aktivitas bersawah bagi para petani.
- b. Penguatan ketahanan pangan tingkat kalurahan.

c. Fasilitasi kelompok masyarakat bidang pertanian.

5. Penganggulan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak

Dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19, pemerintah juga melakukan Penyaluran BLT DD dan bantuan bibit ikan serta kolam kepada masyarakat kelompok.

B. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditmpuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Kalurahan Singosaren, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kalurahan, maupun warga Kalurahan Singosaren secara umum. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan selama tahun 2023 antara lain:

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan kalurahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Kalurahan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten.
2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kalurahan melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius, terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Kalurahan, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh

Pemerintah Kelurahan adalah mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

BAB IX

PENUTUP

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran, namun saat ini sumber pendapatan Pemerintahan Kalurahan adalah anggaran yang ada dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa Bantuan Kinerja dan Infrastruktur, APBD Kabupaten Bantul salah satunya Dana Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah berupa ADD, serta PADes. Maka sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten Singosaren akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun 2023, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Indonesia, selaku pemangku kebijakan pusat;
2. Yth. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku pemangku kebijakan provinsi;
3. Yth. Bapak Bupati Bantul, selaku pemangku kebijakan daerah;
4. Yth. Bapak Panewu Banguntapan, selaku pembina;
5. Yth. Badan Musyawarah Kalurahan Singosaren, selaku pengawas kegiatan;
6. Seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Singosaren dan segenap instansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Kalurahan Singosaren.

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukannya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Singosaren, 7 Maret 2023

Lurah Singosaren

